



Manajemen Strategi Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Karawang

Debby Intan Suci Rahmawati¹, Eka Yulyana², Rahman³

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3}Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 11 September 2022
Revised: 17 September 2022
Accepted: 21 September 2022

Research on Strategic Management of Social Services in Reducing Extreme Poverty in Karawang Regency is motivated by the determination of extreme poverty in Karawang Regency by the central government, which then causes a lot of controversy considering Karawang Regency is one of the areas with great natural potential and then as the area with the second largest Minimum Wage in Indonesia. This study aims to analyze and determine the object of research that is studied using the strategy management theory of Fred R. David (2011) which has three dimensions, formulation, implementation and evaluation. This research is qualitative. The results of research and discussion data show that strategic management in dealing with extreme poverty carried out by the Social Service has not been optimal, this is reinforced starting from the formulation dimension with the lack of formulation of long-term oriented strategic plans and the inability of the Social Service to identify initial problems, then the implementation dimension where the distribution of assistance uneven social distribution and evaluation dimensions which show that the Social Service does not reconstruct existing mistakes by taking corrective steps.

Keywords: *Strategic Management, Extreme Poverty, Countermeasures*

(*) Corresponding Author: 1710631180046@student.unsika.ac.id

How to Cite: Suci Rahmawati, D., Yulyana, E., & Rahman, R. (2022). Manajemen Strategi Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(18), 114-122. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7134027>.

PENDAHULUAN

Permasalahan sosial khususnya mengenai kemiskinan merupakan tantangan bagi negara-negara berkembang di dunia, seperti Indonesia baik di era klasik hingga kontemporer, jumlahnya yang sangat besar bahkan mencapai 1,7 miliar manusia di tahun 2008 dan diproyeksi akan terus mengalami peningkatan sampai lima kali lipat di tahun 2025 mengingat bertumbuhnya jumlah manusia di muka bumi bahkan di tahun yang sama angka meninggal akibat kemiskinan di dunia setiap tahunnya mencapai 27 ribu jiwa (Shah, 2008). Presentase kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik dalam (Girsang, 2021, hal. 23) di Indonesia cenderung menunjukkan arah yang lebih baik dari setiap semesternya, namun dalam kurun waktu dua semester terakhir Indonesia mengalami kenaikan pesat perihal kemiskinan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari lesunya perekonomian global dan adanya wabah pandemi Covid-19.

Sejak tahun 2015-2020 presentase kemiskinan di Indonesia tidak pernah di bawah angka 8 persen. Artinya masih ada 25 juta masyarakat yang mengalami kemiskinan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya berupa kebutuhan pangan sampai non pangan untuk mendapatkan kehidupan yang layak

(Tjondronegoro, 1996, hal. 2). Apabila merujuk pada pernyataan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dalam (Kencana, 2021) penduduk yang dapat dikategorikan ke dalam miskin adalah mereka yang hanya mampu mendapatkan 473 ribu rupiah per bulan. Penetapan standarisasi kemiskinan di Indonesia juga termasuk sangat rendah dan tidak bisa dijadikan tolak ukur atau jika menurut BPS ambang seseorang dapat dikatakan miskin adalah 473 ribu rupiah per bulan, maka ini tidak pasti berlaku di setiap daerah. Ambil contoh, kebutuhan masyarakat di Yogyakarta yang dengan nominal tersebut masih bisa bertahan, namun apabila diaplikasikan ke daerah industri seperti Karawang dengan nominal 500 ribu rupiah per bulan belum tentu dapat bertahan mengingat tingginya harga yang berbeda di setiap daerah. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Max Webster dalam (Girsang, 2021, hal. 12) bahwa pendekatan ukuran kemiskinan menggunakan kebutuhan pokok mempunyai beberapa kelemahan, sebagaimana yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Estimasi kebutuhan kalori hanya ditujukan kepada rata-rata rumah tangga, belum atas dasar komposisi anggota rumah tangga, umur dan jenis kelamin;
2. Peningkatan harga pangan tidak diikuti oleh peningkatan jumlah kalori atau peningkatan harga kebutuhan non beras (minyak, pakaian, perumahan, dll) lebih tinggi dari pada harga beras;
3. Tingkat dan jenis kebutuhan akan berbeda-beda menurut budaya dan perkembangan masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik Nasional Republik Indonesia tahun 2021, disebutkan bahwa kemiskinan di Indonesia tersebar hampir di seluruh penjuru wilayah meliputi daerah perdesaan, perkotaan hingga wilayah campuran antara perdesaan/perkotaan, dengan jumlah penduduk yang dinyatakan masuk ke dalam kategori kemiskinan mencapai lebih dari 60 juta jiwa. Presentase kemiskinan di Indonesia berpotensi lebih banyak dari yang sekedar data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial maupun Badan Pusat Statistik. Melalui tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa kemiskinan di Indonesia menyebar luas di beberapa daerah tidak hanya di daerah terpencil, melainkan juga ke daerah kota besar, seperti Kabupaten Karawang.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai zona ekstrim kemiskinan pada tahun 2021 (Putri, 2021). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang dalam (Salam, 2021) menyebutkan, bahwa pada tahun 2021 jumlah masyarakat yang masuk ke dalam kemiskinan ekstrim di Kabupaten Karawang sebanyak 106708 jiwa, yang tersebar di lebih dari 25 Desa. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2022), rata-rata presentase masyarakat miskin di Kabupaten Karawang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir selalu di atas rata-rata masyarakat miskin yang ada di Provinsi Jawa Barat. Berikut peneliti tampilkan grafik perbandingan rata-rata presentase kemiskinan di Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2019-2021.

Dalam kurun waktu tiga tahun angka kemiskinan di Kabupaten Karawang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Tentu hal ini menjadi sebuah kemirisan tersendiri, mengingat Kabupaten Karawang memiliki julukan kota Industri dengan total lebih dari 1700

perusahaan besar yang melakukan aktivitas produksi di Kabupaten Karawang sehingga menjadikan Karawang sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara (KadinKarawang, 2018), belum lagi potensi alam lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat Karawang seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Karawang Tahun 2020

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas kemiskinan ekstrim yang melanda masyarakat Kabupaten Karawang, hal ini sesuai dengan mandataris yang termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan, bahwa penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Ruang lingkup organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang memiliki fungsi melakukan penanganan terhadap kemiskinan ekstrim adalah Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang tercantum dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Lanjut dan Rujukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Karawang, dalam Pasal 1 dan Pasal 4 dinyatakan bahwa Dinas Sosial dituntut untuk mampu melakukan strategi atas permasalahan sosial di Kabupaten Karawang, seperti kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan argumen di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam melakukan penanganan terhadap kemiskinan ekstrem perlu mempunyai manajemen strategi yang baik. Adapun manajemen strategi yang baik menurut Fred R. David (2019, hal. 3) harus dilakukan melalui proses formulasi, implementasi dan evaluasi agar terciptanya seni serta pengetahuan yang berdampak baik bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam menangani permasalahan kemiskinan ekstrem telah melakukan beberapa upaya, diantaranya adalah merumuskan sasaran dan kebijakan yang akan diaktualisasikan serta melakukan identifikasi peluang maupun ancaman yang datang dari luar lembaga serta faktor kekuatan ataupun kelemahan yang lahir dari segi internal Dinas Sosial Kabupaten Karawang.

Maka dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang, Dinas Sosial telah melakukan penguatan terhadap internal organisasi melalui pelatihan, lalu menghindari ancaman dari luar organisasi dengan cara menjalin kemitraan serta memanfaatkan dana dari pemerintah pusat untuk diberikan kepada masyarakat miskin ekstrem pada program bantuan langsung tunai. Permasalahan mengenai manajemen strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam melakukan penanggulangan kemiskinan ekstrem berkaitan dengan studi ilmu pemerintahan dimana menurut G.A Van Poelje (1953, hal. 6) hal-hal yang berkaitan dengan kedinasan merupakan bagian dari ruang lingkup kajian diskursus Ilmu Pemerintahan. Lebih lanjut, fenomena atas permasalahan kemiskinan adalah cakupan pemerintahan sehingga dia masuk ke dalam bagian yang mampu

dianalisis melalui ilmu pemerintahan karena di dalamnya terkandung dua unsur yakni kesejahteraan sosial dan tata kelola lembaga pemerintahan (Kencana S. I., 2018, hal. 17)

KAJIAN TEORITIS

Manajemen Strategi

Manajemen strategis merupakan upaya dalam menumbuhkan dan mengatur strategi sebuah organisasi atau perusahaan baik swasta maupun pemerintahan ataupun kelompok masyarakat lainnya sehingga organisasi bisa mencapai tujuannya dengan baik dan tepat sesuai sasaran dan waktu yang telah ditetapkan (Afin, 2013, hal. 45). Sementara pendapat ahli lainnya yaitu J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003, hal. 2) menyebutkan, bahwa manajemen strategis merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan atau organisasi dalam durasi yang pendek, menengah dan panjang.

Fred R. David (2019, hal. 5), mengemukakan bahwa manajemen strategi merupakan seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas-fungsional yang memajukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Dari pemaparan tersebut, terdapat tiga tahapan yang dapat dijadikan sebagai variabel dimensi, yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Formulasi Strategi

Tahap awal dalam melakukan manajemen strategi adalah memformulasikan strategi antara lain yang di dalamnya terkandung proses indikator, sebagai berikut : menetapkan visi dan misi; mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut pandang eksternal; menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal; menyusun rencana jangka panjang; membuat strategi-strategi alternatif; dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai.

2. Implementasi Strategi

Tahap berikutnya dalam mengaplikasikan manajemen strategi adalah dengan mengimplementasikan strategi yang didalamnya memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan variabel indikator berupa tujuan tahunan; membuat kebijakan; memotivasi pegawai; dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dapat dilaksanakan.

3. Evaluasi Strategi

Tahap terakhir dalam manajemen strategi adalah dengan cara mengevaluasi strategi. Para pelaku yang terlibat dalam manajemen strategi sangat perlu untuk mengetahui ketika ada strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan dengan baik. Evaluasi strategi memiliki tiga aktifitas indikator yang fundamental, yaitu mereview faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini; mengukur performa; dan mengambil langkah korektif.

Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan, bahwa

penanggulangan atau penanganan kemiskinan merupakan upaya terpadu dan berkelanjutan yang harus difasilitasi, diberdayakan dan didampingi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Sependapat dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2011, hal. 3) memberikan definisi mengenai penanggulangan kemiskinan yaitu sebagai kebijakan dan program pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Menurut Prof. Edy Suardi Hamid selaku Rektor Universitas Widyatama, dalam (Humas Widyatama, 2020), pemerintah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan baik yang bersifat nasional maupun daerah harus dijalankan melalui tiga pilar utama, yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
2. Pembangunan nasional atau daerah yang pro terhadap rakyat.
3. Pemerintahan yang baik atau *Good Government*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok (Sugiyono, 2017). Sehingga metode tersebut memiliki korelasi erat dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai aktivitas pemerintah dalam menangani permasalahan sosial, yaitu manajemen strategi Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam melakukan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang.

Penelitian ini akan menggunakan jenis non probability sampling. Hal ini dikarenakan selain peneliti tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap unsur informan, juga peneliti dapat menggunakan instrumen pendukung yang ada di dalam jenis *non-probability* sampling yakni *purposive sampling* di mana menurut Sugiyono (2017), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, seperti sampel ditunjuk berdasarkan pengetahuan dia yang lebih tentang penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017, hal. 193) adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data. Pengumpulan data dapat dihasilkan dari observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, dalam (Sugiyono, 2017, hal. 246). Miles dan Huberman mengemukakan, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun teknik ini terbagi dalam tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data hasil penelitian, penulis mengkaji permasalahan tentang Manajemen Strategi Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Karawang yang dikaji dengan teori manajemen strategi

Fred R. David (2011) yang memiliki tiga dimensi, formulasi, implementasi dan evaluasi, dihasilkan pembahasan sebagai berikut

Formulasi Strategi

Tahap awal dalam melakukan manajemen strategi adalah memformulasikan strategi antara lain yang di dalamnya terkandung proses indikator, sebagai berikut: menetapkan visi dan misi; mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut pandang eksternal; menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal; menyusun rencana jangka panjang; membuat strategi-strategi alternatif; dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai.

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan produktivitas sosial bagi masyarakat tidak mampu atau berada dalam zona ekstrem kemiskinan.	Penataan asistensi sosial terpadu berbasis keluarga melalui program bantuan langsung tunai, peningkatan kapasitas pengasuhan dan usaha keluarga pengembangan penyaluran.	Pengembangan sistem sosial yang komprehensif
Meningkatnya peluang kerja.	Pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga tidak mampu.	Dukungan penyelenggaraan skema jaminan sosial bersumber dari pemerintahan pusat serta pengembangan sumber daya manusia.
Tercapainya tingkat sosial ekonomi yang memadai.	Optimalisasi kemitraan dan sarana/prasarana dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.	Melakukan pendampingan, fasilitasi, pelatihan dan memberi kesempatan kepada masyarakat tidak mampu untuk berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial baik di ruang lingkup balai pelatihan sosial maupun di luar serta menjalin kemitraan yang baik dengan pihak luar.
Meningkatnya kemampuan petugas atau pegawai dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di zona ekstrem kemiskinan.	Melaksanakan pelatihan bagi para petugas atau karyawan tentang manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat tidak mampu atau yang berada dalam lingkup zona ekstrem kemiskinan di Kabupaten Karawang.	Memfasilitasi pelatihan pengurus, petugas atau karyawan.

Sumber: Rencana Strategis Dinas Sosial Karawang, 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang, Dinas Sosial telah melakukan penguatan terhadap internal organisasi melalui pelatihan, lalu menghindari ancaman dari luar organisasi dengan cara menjalin kemitraan serta memanfaatkan dana dari pemerintah pusat untuk diberikan kepada masyarakat miskin ekstrem pada program bantuan langsung tunai. Atas dasar ini, maka Dinas sosial masih memberikan perencanaan yang belum optimal karena perumusan kebijakan hanya sebatas program pemberian bantuan tunai bukan kepada pelatihan yang berorientasi jangka panjang.

Selain daripada ketiadaan pelatihan terdapat sebuah asumsi yang mengarahkan penulis untuk memberikan ulasan atas formulasi strategi berupa ketidakmampuan pemerintah daerah Kabupaten Karawang untuk memaksimalkan

potensi daerah Karawang yang cukup melimpah baik dari sumber daya manusia maupun alam. Selain itu adanya jaminan kerja dan pelatihan hanya diorientasikan kepada pegawai bukan masyarakat sehingga pendistribusian ilmu guna meningkatkan taraf ekonomi sangatlah kurang optimal.

Implementasi Strategi

Tahap berikutnya dalam mengaplikasikan manajemen strategi adalah dengan mengimplementasikan strategi yang didalamnya memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan variabel indikator berupa tujuan tahunan; membuat kebijakan; memotivasi pegawai; dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dapat dilaksanakan.

Semenjak ditetapkan sebagai daerah dengan kemiskinan ekstrem pada tahun 2021 sampai dengan penulis menyelesaikan jurnal ini pada tahun 2022 angka kemiskinan di Kabupaten Karawang masih belum dikatakan optimal hal ini dapat dilihat melalui grafik angka kemiskinan kabupaten Karawang yang dibawah provinsi Jawa Barat yakni pada tahun 2021 dimana Karawang mendapati masyarakat miskin sebanyak 8,95 persen sedangkan Jawa Barat hanya 8,5 persen. Angka ini dapat terus mengalami pelonjakan mengingat adanya kenaikan disektorBBM yang dicabut subsidiya.

Adapun kebijakan yang telah dan atau sedang dilaksanakan Dinas Sosial yang bekerjasama dengan beberapa pihak diantaranya TP2K Karawang yang diketuai oleh Wakil Bupati Karawang ialah pemberian bantuan sosial yang dianggarkan dari pihak nasional kemudian dalam pendistribusiannya ini dibagikan secara bertahap selama 3 bulan sekali. Namun pembagian ini mengalami inkonsistensi dimana masyarakat ada yang mendapatkan ada pula yang tidak, bahkan tidak sedikit diantara mereka tidak mengetahui sama sekali mengenai bantuan sosial.

Evaluasi Strategi

Tahap terakhir dalam manajemen strategi adalah dengan cara mengevaluasi strategi. Para pelaku yang terlibat dalam manajemen strategi sangat perlu untuk mengetahui ketika ada strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan dengan baik. Evaluasi strategi memiliki tiga aktifitas indikator yang fundamental, yaitu mereview faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini; mengukur performa; dan mengambil langkah korektif.

Berdasarkan Rencana Strategi Dinas Sosial terdapat tujuh variabel program kerja Dinas Sosial tahun 2018-2021 yang berkaitan dengan fenomena kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian evaluasi kinerja Dinas Sosial dalam menjalankan program maupun perencanaan atas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang. Adapun dari data tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa indikator pemberdayaan fakir miskin, koordinator kegiatan sosial serta sosialisasi dan evaluasi BNPT telah berjalan optimal namun bimbingan sosial dan ketrampilan bagi kaum dhuafa masih belum mencapai target yang ditentukan dari setiap tahunnya juga adanya ketidakpastian dalam penyebutan data kemiskinan di Kabupaten Karawang dalam Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Karawang.

Menurut Suchman yang dikutip oleh Arikunto dan Abdul (2010) evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Oleh karena pendapat ahli tersebut, maka penulis mengidentifikasi bahwa evaluasi atas hasil penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang tidak optimal karena minimnya program-program yang telah berjalan yang bersifat jangka panjang serta adanya temuan-temuan yang bersifat destruktif seperti ketidaktahuan masyarakat mengenai bantuan sosial

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Manajemen Strategi Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Karawang yang dikaji dengan teori manajemen strategi Fred R. David (2011) penulis mempunyai kesimpulan berupa

1. Formulasi strategi Dinas sosial belum dapat dikatakan optimal dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang karena minimnya rencana yang berorientasi jangka panjang dan ketidakmampuan secara baik Dinas Sosial dalam mengidentifikasi permasalahan kemiskinan ekstrem
2. Implementasi strategi Dinas sosial belum dapat dikatakan optimal dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang karena pemerataan bantuan sosial yang tidak baik bagi masyarakat yang terdata sebagai penerima bantuan kesejahteraan
3. Evaluasi strategi Dinas sosial belum dapat dikatakan optimal dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang karena ketiadaan langkah korektif dan pengidentifikasian ulang atas permasalahan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afin. (2013). *Menciptakan SDM Berkualitas*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2022, Januari 3). *Beranda » Kemiskinan » Persentase Penduduk Miskin*. Retrieved from Persentase Penduduk Miskin (Persen), 2019-2021: <https://jabar.bps.go.id/indicator/23/51/1/persentase-penduduk-miskin.html>
- David, F. R. (2019). *Manajemen Strategik Edisi 19*. Jakarta: Salemba Empat.
- Girsang, W. (2021). *Kemiskinan Multidimensional di Pulau-Pulau Kecil*. Ambon: Badan Penerbit Fakultas Pertanian.
- Humas Widyatama. (2020, Agustus 6). *Universitas Widyatama>Homenews>Akses Wirausaha Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan*. Diambil kembali dari Akses Wirausaha sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan: <http://new.widyamatararam.ac.id/content/news/akses-wirausaha-sebagai-strategi-pengentasan-kemiskinan#.Yf6kYOrMLIU>
- Hunger, J. D., & Wheelen, T. L. (2003). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- KadinKarawang. (2018, April 6). *KadinKarawang>Ekonomi*. Retrieved from Karawang Menuju Kota Industri Terbesar di Asia Tenggara:

- <https://kadinkarawang.org/berita-karawang-menuju-kota-industri-terbesar-di-asia-tenggara.html>
- Karawang bekasi Ekspres. (2021, Oktober 28). *Karawang bekasi Ekspres > Beranda > Metro Karawang*. Retrieved from Karawang Jadi Pusat Pembuangan Limbah Beracun?: <https://karawangbekasi.jabarekspres.com/2021/10/28/karawang-jadi-pusat-pembuangan-limbah-beracun/>
- Kencana, M. R. (2021, Juli 15). *Liputan6 > Home > Ekonomi*. Retrieved from BPS: Penduduk Berpenghasilan di Bawah Rp 472.525 per Bulan Masuk Kategori Miskin: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4607816/bps-penduduk-berpenghasilan-di-bawah-rp-472525-per-bulan-masuk-kategori-miskin#:~:text=Adapun%20tolak%20ukur%20penduduk%20miskin,472.525%20per%20kapita%20per%20bulan.>
- Kencana, S. I. (2018). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Poelje, G. A. (1953). *Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan, cetakan kedua*. Jakarta: N.V Soeroengan.
- Putri, E. A. (2021, Oktober 13). *Pikiranrakyat > Home > JawaBarat*. Retrieved from Karawang Jadi Salah Satu Daerah dengan Kemiskinan Ekstrem, Spanduk Kritik Terbentang di Jalan: <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-012792369/karawang-jadi-salah-satu-daerah-dengan-kemiskinan-ekstrem-spanduk-kritik-terbentang-di-jalan>
- Salam, B. (2021, Oktober 13). *Merdeka.com > News*. Retrieved from 106.780 Warga Karawang Mengalami Kemiskinan Ekstrem: <https://www.merdeka.com/peristiwa/106780-warga-karawang-mengalami-kemiskinan-ekstrem.html>
- Salusu, J. (2015). *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Shah, A. (2008). *Basic of Guidance and Counselling*. New Delhi: Global Vision.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Kemiskinan : teori, fakta dan kebijakan*. Jakarta: Impac.
- Taufiqrokhman. (2016). *Manajemen Strategik*. Jakarta: FISIP Univ. Dr. Moestopo.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2011). *Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah*. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Tjondronegoro. (1996). *Indonemiskinesia*. Jakarta: Asian Development Bank.